



LAPORAN MANAJEMEN RESIKO



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

**Jl. Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu, Putussibau Selatan 78715
Website: <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id>
Email: admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id**

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen resiko suatu proses identifikas, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus resiko yang tidak dapat diterima. Resiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi resiko. Manajemen resiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.

Manajemen resiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu resiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan resiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari resiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekwensi resiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen resiko yg meliputi penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen resiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada resiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisiri atau bahkan dapat dihilangkan. Kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dapat semakin optimal.

B. RUANG LINGKUP

Manajemen resiko dilakukan dengan ruang lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu seperti dari Dokumen, SDM dan Lingkungan.

C. RENCANA DAN EVALUASI MANAJEMEN RESIKO

Berdasarkan uraian di atas, semua kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 pasti memiliki resiko yang mungkin akan terjadi baik resiko sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

Formulasi perhitungan Matriks resiko Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1 Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 X 5			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
LEVEL KEMUNGKINAN	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Tabel 2 Level Risiko

Tingkatan	Level Resiko	Range Resiko	Warna
5	Sangat Tinggi	$20 \leq x \leq 25$	Merah
4	Tinggi	$16 \leq x \leq 19$	Oranye
3	Sedang	$12 \leq x \leq 15$	Kuning
2	Rendah	$6 \leq x \leq 11$	Hijau
1	Sangat Rendah	$1 \leq x \leq 5$	Biru

Berikut resgister manajemen resiko Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022:

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah																			
1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perenanaan perangkat Daerah	1.	Ketidakselarasan antar dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA) serta penyesuaian nomenklatur yang dikeluarkan untuk perangkat daerah	Adanya Perubahan Kebijakan dan aturan dari Pemerintah Pusat/Pimpina n di daerah karena suatu kondisi tertentu	C	Terlambatnya Penyusunan Dokumen Renstra,Renja dan tumpang tindihnya program kegiatan didalam nomenklatur terhadap SOTK perangkat daerah.	Konsultasi dan koordinasi kepada pihak BAPPEDA	√				√	4	4	16	4 (Tinggi - Dimitigasi)	Melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala	Sekretaris BKPSDM
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.	Item rincian belanja pada Aplikasi tidak tersedia saat penginputan.	Perubahan kebijakan didalam Penyusunan dokumen RKA sudah melalui proses input melalui aplikasi SIPD dengan memasukkan rincian objek belanja pada sub kegiatan	C	Terhambatnya proses penginputan dokumen RKA pada Aplikasi	Pengajuan usulan rincian obyek belanja baru ke bagian keuangan yang menaungi aplikasi tersebut	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Konsultasi kepada pihak bagian keuangan terkait proses,tahapan dan alur penginputan dokumen pada aplikasi	Sekretaris BKPSDM
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.	Item rincian belanja pada Aplikasi tidak tersedia saat penginputan.	Perubahan kebijakan didalam Penyusunan dokumen RKA sudah melalui proses input melalui aplikasi SIPD dengan memasukkan rincian objek	C	Terhambatnya proses penginputan dokumen RKA pada Aplikasi	Pengajuan usulan rincian obyek belanja baru ke bagian keuangan yang menaungi aplikasi tersebut	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Konsultasi kepada pihak bagian keuangan terkait proses,tahapan dan alur penginputan dokumen pada aplikasi	Sekretaris BKPSDM

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					belanja pada sub kegiatan														
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.	Item rincian belanja pada Aplikasi tidak tersedia saat penginputan.	Perubahan kebijakan didalam Penyusunan dokumen RKA sudah melalui proses input melalui aplikasi SIPD dengan memasukan rincian objek belanja pada sub kegiatan	C	Terhambatnya proses penginputan dokumen RKA pada Aplikasi	Pengajuan usulan rincian obyek belanja baru ke bagian keuangan yang menaungi aplikasi tersebut	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Konsultasi kepada pihak bagian keuangan terkait proses,tahapan dan alur penginputan dokumen pada aplikasi	Sekretaris BKPSDM
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.	Item rincian belanja pada Aplikasi tidak tersedia saat penginputan.	Perubahan kebijakan didalam Penyusunan dokumen RKA sudah melalui proses input melalui aplikasi SIPD dengan memasukan rincian objek belanja pada sub kegiatan	C	Terhambatnya proses penginputan dokumen RKA pada Aplikasi	Pengajuan usulan rincian obyek belanja baru ke bagian keuangan yang menaungi aplikasi tersebut	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Konsultasi kepada pihak bagian keuangan terkait proses,tahapan dan alur penginputan dokumen pada aplikasi	Sekretaris BKPSDM
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	1.	Kurangnya pemenuhan Data dalam penyusunan laporan kinerja	Data yang disampaikan kurang akurat	C	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja dilaporkan tidak sesuai jadwal	Membuat dan menyampaikan format pengisian laporan kinerja perbidang	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala	Sekretaris BKPSDM

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada						Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor	Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko		
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN secara Tepat Waktu	1.	Terdapat Error pada Aplikasi/Jaringan pada saat proses input administrasi	Adanya gangguan jaringan atau human error	C	Keterlambatan penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	Konsultasi pada pihak terkait	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Koordinasi dengan PD yang bertanggung jawab terhadap aplikasi/Jaringan	Sekretaris BKPSDM
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.	Tidak tertib Administrasi keuangan	Verifikasi tidak dilakukan dengan teliti	C	Pertanggungjawaban pengeluaran tidak diterima oleh BKAD	Reviuw Atasan	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Penguatan proses review atasan dan sosialisasi mekanisme verifikasi pertanggungjawaban pengeluaran keuangan	Sekretaris BKPSDM
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.	Tidak tersedianya Laporan keuangan Akhir Tahun	Berkas kurang lengkap	C	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun belum bisa dilaksanakan	Reviuw Atasan	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Pembentukan tim untuk membantu penyelesaian laporan keuangan Akhir Tahun	Sekretaris BKPSDM

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		SKPD																	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD	1.	Tidak tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan semesteran masih dalam bentuk softcopy	C	Laporan keuangan belum bisa digunakan	Reviuw Atasan	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Menyegerakan untuk mengeluarkan laporan keuangan semesteran dalam bentuk Hardcopy	Sekretaris BKPSDM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.	Adanya keterlambatan dalam pengajuan proses pengadaan pakaian dinas.	Pihak penyedia belum memahami tahapan dalam proses pengadaan	C	Pengadaan pakaian tidak selesai tepat waktu	Konsultasi dan Koordinasi kepada pihak pejabat pengadaan	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Membuat time schedule proses pengadaan barang dan jasa	Sekretaris BKPSDM
Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	1.	Tidaknya tersedianya komponen Instalasi Listrik	Kekurangan penyediaan komponen Instalasi Listrik	C	Aktifitas diruangan dikantor gelap	Koordinasi	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Peninjauan kembali komponen instalasi listrik yang dibutuhkan	Sekretaris BKPSDM
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.	Tidak tersedianya kebutuhan peralatan kantor	Kurangnya ketersediaan kebutuhan peralatan kantor	C	Aktifitas menjadi terhambat dalam kebutuhan peralatan kantor	Reviuw Atasan	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Koordinasi terhadap pengadaan peralatan dan kelengkapan kantor	Sekretaris BKPSDM

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1.	Tidak tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga	Kurangnya ketersediaan kebutuhan peralatan rumah tangga	C	Aktifitas menjadi terhambat dalam kebutuhan peralatan rumah tangga	Reviuw Atasan	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Peningkatan Review atasan	Sekretaris BKPSDM
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1.	Tidak tersedianya barang cetakan dan penggadaan	Keterlambatan penyediaan barang cetakan dan penggadaan	C	Aktifitas penggunaan barang cetakan dan penggadaan menjadi terganggu	Upaya yang lebih komunikatif	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Koordinasi terhadap pengadaan barang cetakan dan penggadaan	Sekretaris BKPSDM
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.	Ketidakterediaan bahan bacaan atau referensi menyangkut peraturan perundang-undangan.	Keterbatasan anggaran	C	Penerimaan informasi kurang	Reviuw Atasan	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Perencanaan anggaran sesuai kebutuhan	Sekretaris BKPSDM
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya a Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.	Tidak terlaksana secara maksimal Rapat koordinasi dan konsultasi	Jadwal kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi daerah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi	C	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi menjadi tidak baik	Memaksimalkan rapat melalui virtual meeting	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Komunikasi lebih ditingkatkan	Sekretaris BKPSDM
18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya a Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.	Kondisi penyimpanan Arsip belum sesuai SOP	Belum adanya sarana prasarana terkait penyimpanan arsip tersebut	C	Penyimpanan Arsip tidak sesuai sebagai mana mestinya	Penataan Arsip dilakukan secara manual	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Penyediaan sarana prasarana penyimpanan arsip sesuai standar	Sekretaris BKPSDM
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Terlaksananya a Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1.	Jaringan komunikasi data yang lambat / sering terputus	Aplikasi dan ketersediaan jaringan belum optimal	C	Aktifitas Pekerjaan menjadi terhambat	Reviuw Atasan	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Peningkatan koordinasi terhadap pihak terkait	Sekretaris BKPSDM

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		n Berbasis Elektronik pada SKPD																	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.	Tidak terpenuhinya kegiatan jasa surat menyurat	Gangguan teknis kegiatan jasa surat menyurat	C	Kegiatan operasional terganggu	Reviuw Atasan	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Peningkatan reviu atasan	Sekretaris BKPSDM
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.	Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik tidak terpenuhi	Gangguan teknis penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	C	Kegiatan operasional terganggu	Koordinasi	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Peningkatan koordinasi	Sekretaris BKPSDM
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.	Tidak terpenuhinya gaji Non ASN	Anggaran terbatas	C	Pembayaran gaji tenaga honor tidak terfasilitasi	Reviuw Atasan	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Perencanaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan tenaga honor	Sekretaris BKPSDM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.	Tidak terlaksananya jasa servis dan penggantian suku cadang, BBM, Pajak kendaraan dan penggantian STNK	Tidak cermat dalam membuat jadwal Pelaksanaan	C	Terlambat dalam pelaksanaan jasa servis dan penggantian suku cadang, BBM, pajak kendaraan dan penggantian STNK	Reviuw Atasan	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Perbaikan pengkondisian jadwal	Sekretaris BKPSDM
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya	1.	Tidak terlaksananya jasa servis dan penggantian suku cadang, BBM, Pajak	Tidak cermat dalam membuat jadwal	C	Terlambat dalam pelaksanaan jasa servis dan penggantian suku	Reviuw Atasan	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Perbaikan pengkondisian jadwal	Sekretaris BKPSDM

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan dan penggantian STNK	Pelaksanaan		cadang, BBM, pajak kendaraan dan penggantian STNK												
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.	Tidak sinkronnya data kerusakan peralatan dan mesin dengan perencanaan	Terlambatnya pelaksanaan	C	Sarana dan prasarana yang tidak dalam keadaan baik dan siap digunakan	Reviuw Atasan	√				√	4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Perbaikan pengkondisian jadwal	Sekretaris BKPSDM
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																			
26	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi PNS dan PPPK yang terisi	1.	1. Jumlah Formasi yang diajukan ke Menpan tidak semuanya disetujui/diakom odir 2. Tidak memiliki gedung/ laboratorium CAT serta sarana dan prasaranan kelengkapan untuk pelaksanaan test CAT	1. Karena keterbatasan anggaran oleh (APBN) untuk pembayaran gaji Keterbatasan anggran (APBD) Pemerintah Daerah.	UC	Adapun dampak yang akan terjadi: 1. Bahwa Pemda akan sulit untuk memenuhi kekurangan ASN berdasarkan ANJAB dan ABK, sehingga banyak pekerjaan yang selesai tidak tepat waktu. 2. Dengan tidak adanya gedung dan prasarana pendukung tentu akan mempersulit dalam pelaksanaan Seleksi CAT, dan pelaksanaan tes	Adapun usaha yang dilakukan: 1. Untuk mengisi kekosongan tersebut maka Pemda mengambil kebijakan dengan pengangkata n tenaga kontrak dan selalu berkoordinas dengan Menpan agar dapat mempertimb angkan diberikan kuota formasi	√			√		5	4	20	5 (Sangat Tinggi- Dimitigasi)	Adapun rencana yang dilakukan: 1. Melaksana n koordinasi dengan Menpan agar kedepannya formasi yang diberikan setidaknya dapat sesuai dengan ANJAB dan ABK ataupun setidak- tidaknya jumlah formasi yang didapat sebanyak jumlah yg pension pada	Kabid Mutasi

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada						Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor	Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko		
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							harus menyesuaikan jadwal dengan gedung/sarana prasarana yang akan kita pinjam, sehingga mengganggu dalam efisiensi waktu, tenaga dan biaya serta mengganggu/ merubah jadwal yang sudah direncanakan oleh pihak pusat	yang sesuai dengan jumlah kebutuhan ANJAB dan ABK 2. Bekerjasama dengan pihak BKN dalam hal penentuan jadwal agar pelaksanaan tes menyesuaikan dengan jadwal kesiapan panitia dan gedung yang akan kita gunakan 3. Bekerjasama dengan Sekolah yang memiliki Gedung serta sarana dan prasarana yang sesuai ketentuan untuk pelaksanaan test mengingat Pemda belum memiliki fasilitas										tahun tersebut 2. Membuat telahan staf kepada pimpinan alasan diperlukannya Gedung serta sarana dan prasarana untuk kegiatan Seleksi CAT tersebut.	

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								tersebut											
		Jumlah SK calon PNS dan PPPK yang terselesaikan Jumlah SK PNS dan PPPK yang terselesaikan Jumlah usulan formasi PNS dan PPPK	2.	Resiko yang kemungkinan terjadi: Terlambatnya penerbitan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang SK calon PNS dan PPPK yang terselesaikan Jumlah SK PNS dan PPPK yang terselesaikan.	adapun penyebab resiko tersebut: 1. Menunggu Proses penerbitan Nota Persetujuan 2. Keterlambatan informasi serta penyampaian kekurangan berkas dan penyampaian perbaikan berkas baik dari BKN maupun Calon ASN 3. Kurangnya koordinasi antara BKPSDM dan BKN dalam pengurusan persetujuan berkas tersebut 4. Keterlambatan pihak LAN dalam	UC	Dampak yang akan terjadi: Bahwa rentang waktu melaksanakan tugas ASN tersebut dgn TMT SK nya akan jauh, sehingga pekerjaan yang sudah seharusnya dapat dilaksanakan akan tertunda dikarenakan keterlambatan proses administrasi tersebut, sehingga berdampak pada kinerja OPD	Adapun usaha yang dilakukan: 1. Memberikan pembekalan dan pengarahan kepada Calon ASN serta CPNS menjadi PNS syarat apa saja yang harus dilengkapi dengan maksud untuk meminimalisir kesalahan dalam pengusulan berkas; 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak BKN, LAN serta para Calon ASN untuk proses penyelesaian usulan berkas yang menjadi kewenangan masing-	v			v		4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Rencana yang akan dilakukan: 1. Melaksanak n Pembekalan atau pengarahan setiap kali adanya pengangkat an Calon ASN 2. Membuatka n buku petunjuk baik dalam bentuk pdf ataupun power point mengenai syarat-syarat serta contoh blangko yang harus disiapkan calon ASN untuk menghindari kesalahan dalam pengusulan. 3. Melakukan koordinasi dan Komunikasi lebih intens baik melalui	Kabid Mutasi

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					penyampaian Sertifikat Latsar, mengingat sertifikat tersebut merupakan salah syarat untuk perubahan status dari CPNS ke PNS			masing instansi										surat ataupun media lainnya kepada Instansi yang berkepentingan agar proses penyelesaian berkas dapat selesai tepat waktu.	
27	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun dan pemberhentian ASN diterbitkan Terlaksananya pembekalan bagi ASN yang akan memasuki batas usia pensiun (BUP)	1.	Beberapa resiko yang kemungkinan terjadi: 1. Terlambatnya penerbitan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun; 2. Kesalahan data keluarga yang ditanggung oleh Pensiunan; dan 3. Kekeliruan dalam pengisian formulir dan berkas administrasi pendukung pengajuan Pensiun;	Adapun beberapa penyebabnya yaitu: 1. Pemberkasan administrasi pensiun dari PNS yang sudah mendekati waktu pensiunnya; 2. Kodisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang lumayan luas dengan keterbatasan jaringan internet yang memadai;	UC	Adapun dampak yang terjadi karena permasalahan yang timbul tersebut yaitu: 1. mengakibatkan keterlambatan seorang PNS menerima hak pensiunnya, baik hak gaji bulan terakhir karena kenaikan pangkat pengabdian, maupun pada hak pensiun bulanan serta Tunjangan Hari Tuanya; dan 2. mengakibatkan adanya kelebihan bayar yang harus	Adapun usaha yang dilakukan untuk mengendalikan agar permasalahan tersebut tidak terjadi yaitu: 1. melakukan koordinasi secara intensif kepada Subbag Umum dan aparaturnya setiap OPD untuk mengingatkan PNS yang akan memasuki masa pensiunnya; 2. melakukan	v			v		4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Rencana pengendalian yang dilakukan: 1. Melaksanakan Sosialisasi / Pembekalan setaah sebelumnya terhadap PNS yang akan pensiun; 2. Menyiapkan aplikasi pengajuan pensiun yang dapat mempermudah setiap PNS dari lokasi jauh untuk dapat diverifikasi terlebih dahulu	Kabid Mutasi

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					3. Lamanya proses penerbitan persetujuan teknis dari Kantor Regional V BKN; 4. Masih seringnya terjadi kekeliruan pemahaman terhadap kelengkapan berkas administrasi sehingga membuat waktu melengkapi Kembali menjadi lebih lama dikarenakan kondisi jarak yang tergolong jauh.		dikembalikan oleh seorang pensiunan karena belum dapat diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).	koordinasi secara intensif kepada pengelola pensiun di Kantor Regional V BKN untuk PNS golongan IV/a ke bawah dan pengelolaan pensiun BKN untuk PNS golongan IV/b ke atas. 3. Melakukan koordinasi secara intensif kepada pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta pihak TASPEN terkait pembayaran hak pensiun PNS.										berkasnya sebelum disampaikan ke BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu; 3. Melakukan koordinasi intensif kepada pihak Kanreg V BKN dan kantor BKN baik secara komunikasi via telfon maupun secara tatap muka.	
28	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi	1.	SIMPEG belum terintegrasi ke seluruh OPD, SAPK	Kapasitas Server Aplikasi SIMPEG masih	UC	Simpeg Online belum bisa terintegrasi dan	Pembuatan Database Offline dan	√			√		5	4	20	5 (Sangat Tinggi-	Pembangunan Sistem Informasi	Kabid D2KP

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		kepegawaian yang terpelihara		BKN yang sudah ada hanya bisa diakses oleh Admin BKPSDM/BKD di daerah yang ditunjuk oleh BKN, dan Kurang memadainya infrastruktur teknologi informasi.	terbatas untuk diakses seluruh OPD, OPD tidak diberikan akses sebagai operator di SAPK BKN, dan masih menggunakan database kepegawaian offline dengan melakukan pemutakhiran data secara terpisah antara SAPK BKN dengan database kepegawaian.		digunakan oleh seluruh OPD, keterbatasan informasi kepegawaian dan proses pembaruan serta pemutakhiran data belum tersinkronisasi dengan SAPK BKN	mempublikasi data pegawai di Website									Dimitigasi)	Kepegawaian Online yang terintegrasi antar OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Optimalisasi penggunaan My SAPK BKN berbasis Android atau iOS melalui perangkat seluler telepon genggam yang dapat diakses oleh seluruh PNS dan Pengadaan Server baru sebagai sarana untuk mengakses aplikasi SIMPEG Online dan penyimpanan data PNS secara elektronik.	
29	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Updating data PNS Persentase usulan kartu pegawai, kartu suami	1.	Masih adanya ketidaksesuaian antara data PNS di SIMPEG Offline dengan kondisi nyata di lapangan, Masih adanya data PNS yang belum sinkron antara	Adanya proses mutasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur perundang-undangan	C	Data kepegawaian yang tidak akurat, pemutakhiran data yang tidak maksimal serta pendataan dan penataan arsip tidak memenuhi	Memperingatkan OPD agar melakukan proses mutasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,	√			√		4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Perlunya pengalokasian anggaran yang dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan Rekonsiliasi	Kabid D2KP

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		dan kartu istri yang difasilitasi		data yang disampaikan ke BKN dengan KANREG V BKN dan Ruang arsip PNS kurang memadai dan tidak memenuhi standar kearsipan.	yang dilakukan oleh OPD tanpa melalui BKPSDM dan keterbatasan anggaran untuk melakukan renovasi ruang arsip yang memadai dan sesuai dengan standar kearsipan.		standar kearsipan, baik secara fisik maupun digital	Melakukan Rekonsiliasi Data Pegawai secara manual ke seluruh OPD dan menata ruangan arsip menjadi layak pakai serta arsip dapat tertata dengan baik										data dan pengarsipan data PNS, Melakukan koordinasi dan konsultasi ke KANREG V BKN dan BKN Pusat agar permasalahan kepegawaian dapat diselesaikan dan Melakukan renovasi ruangan arsip yang ditata sebaik mungkin yang memenuhi syarat dan sesuai standar kearsipan.	
Mutasi dan Promosi ASN																			
30	Pengelolaan Mutasi ASN		1.	Beberapa Resiko yang kemungkinan terjadi yaitu: 1. Belum tersebarnya penyebaran ASN secara merata di setiap OPD, terutama di wilayah kecamatan; 2. Kekurangan tenaga yang dapat mengisi jabatan berdasarkan Peta	Adapun penyebab terjadinya yaitu: 1. Bahwa fasilitas kurang memadai, jarak tempuh, kondisi geografis, kondisi alam dan	UC	Adapun dampak yang akan terjadi: 1. Sulitnya tercapai pemertaan ASN di setiap OPD berdasarkan ANJAB dan ABK yang ada 2. Kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat akibat tenaga	Adapun pengendalian yang dilakukan: 1. ASN pada penempatan pertama diminta untuk membuat surat pernyataan tidak menuntut pindah dalam jangka waktu	√			√		5	4	20	5 (Sangat Tinggi – Dimitigasi)	Rencana yang akan dilaksanakan: 1. Lebih selektif dan lebih memperketa t proses mutasi, terutama bagi ASN yang OPD nya masih sangat	Kabid Mutasi

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jabatan sehingga untuk melakukan mutasi sangat sulit (Jumlah jabatan yang ada dengan ASN yang ada tidak seimbang). 3. Proses Mutasi antar Kementerian Lembaga Provinsi/Kab/Kota memakan waktu yang lama	medan yang berat sehingga menyebabkan ASN merasa betah atau sulit bertahan dengan kondisi tersebut terutama di daerah perbatasan 2. Formasi penerimaan CPNS yang ada lebih sedikit dari PNS yang pensiun setiap tahunnya sehingga sulit untuk memutasikan PNS yang ada pada saat ini. 3. Kurangnya koordinasi antara BKPSDM dan Instansu terkaiti		yang ada tidak mencukupi. 3. Adanya penambahan biaya dari ASN yang akan pindah maupun Instansi penerima ASN tersebut karena seluruh biaya dibebankan kepada Instansi penerima berdasarkan aturan.	± 10 Tahun dengan maksud agar tidak terjadi kekosongan pada Instansinya; 2. Memberikan fasilitas berupa rumah dinas dan kendaraan dinas kepada ASN sebagai bentuk untuk mempermudah dalam beraktivitas 3. Proses pindah lebih mendepankan less papper misalnya dengan berkas yg diserahkan diminta dalam bentuk softcopy dan dikirimkan via email, wa dengan maksud untuk mengurangi biaya pengiriman dan penggunaan									kekurangan 2. Berkoordinasi dengan BKAD Kab. Kapuas Hulu untuk mengitung kemampuan anggaran pembayaran gaji PPPK sehingga dapat perhitungan formasi yang akan diusulkan dan OPD yg menjadi prioritas dalam usulan formasi tersebut		

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					yang menangani pindah antar Instasi			kertas. 4. Melakukan koordinasi secara intens dengan pihak BKD Provinsi Kalimantan Barat, Kanreg V BKN, Kantor BKN dan Kemendagri untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana perkembangan proses mutasi tersebut											
31	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah Jumlah peningkatan pendidikan ASN yang difasilitasi Jumlah SK berkala ASN yang diterbitkan Jumlah SK kenaikan pangkat ASN	1.	Beberapa resiko yang kemungkinan terjadi yaitu: 1. Keterlambatan pembayaran gaji PNS karena adanya Keputusan Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat; 2. Kesalahan perhitungan besaran gaji yang dibayarkan 3. Masih sering terjadinya kekeliruan dalam kelengkapan berkas pengajuan	Adapun penyebab terjadinya yaitu: 1. Masih kurangnya pemahaman terkait cara perhitungan masa kerja; 2. Masih kurangnya pemahaman terhadap administrasi yang diperlukan	UC	Adapun dampak yang terjadi yaitu: 1. Adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran besaran gaji PNS dikarenakan kekeliruan perhitungan masa kerja; 2. Keterlambatan pembayaran gaji PNS sesuai dengan perhitungan baru karena adanya	Adapun usaha yang dilakukan untuk mengendalikan agar permasalahan tersebut tidak terjadi yaitu: 1. melakukan koordinasi secara intensif kepada Subbag Umum dan aparaturnya setiap OPD untuk mengingatkan PNS yang akan memasuki masa	√			√		4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Rencana pengendalian yang dilakukan: 1. Melaksanakan Sosialisasi / Pembekalan seta-hun sebelumnya terhadap PNS yang akan pensiun; 2. Menyiapkan aplikasi pengajuan pensiun yang dapat mempermudah setiap	Kabid Mutasi

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		yang		Kenaikan Pangkat PNS baik dalam bentuk hard copy nya maupun soft copy nya;	dalam proses Kenaikan Pangkat dan Peningkatan Pendidikan atau penyesuaian ijazah, khususnya bagi PNS dalam jabatan fungsioan tertentu; 3. Kurangnya kontrol terkait periode Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat PNS di bagian umum dan aparatur OPD.		kenaikan gaji berkala ataupun kenaikan pangkat; 3. Keterlambatan dalam Kenaikan Pangkat akan mempengaruhi pengembangan karir bagi setiap PNS baik bagi PNS dalam Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional Tertentu; 4. Memungkinkan menghambat proses regenerasi dalam pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.	pensiunnya; 2. melakukan koordinasi secara intensif kepada pengelola pensiun di Kantor Regional V BKN untuk PNS golongan IV/a ke bawah dan pengelolaan pensiun BKN untuk PNS golongan IV/b ke atas. 3. Melakukan koordinasi secara intensif kepada pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta pihak TASPEN terkait pembayaran hak pensiun PNS.									PNS dari lokasi jauh untuk dapat diverifikasi terlebih dahulu berkasnya sebelum disampaikan ke BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu; 3. Melakukan koordinasi intensif kepada pihak Kanreg V BKN dan kantor BKN baik secara komunikasi via telfon maupun secara tatap muka.		
32	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pejabat Sruktural yang memenuhi persyaratan menduduki	1.	Belum optimalnya penempatan PNS pada jabatan (structural/pelaksana)	Penempatan PNS atas rekomendasi Tim Penilai Kinerja/Kepala OPD)	C	Pelaksanaan Pekerjaan yang berjalan belum maksimal	Pelaksanaan Assesment Kompetensi bagi Pejabat Struktural	√				√	5	4	20	5 (Sangat Tinggi-Dimitigasi)		Kabid PSDMA

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		jabatan pimpinan tinggi pratama Jumlah pembinaan karir PNS																	
	Pengembangan Kompetensi ASN																		
33	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang menerima bantuan tugas belajar Jumlah Kegiatan pendampingan pendaftaran calon mahasiswa sekolah ke dinasan Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	1.	Terhambatnya Pengembangan Kompetensi PNS melalui jalur pendidikan	Keterbatasan anggaran, Kurangnya akses terhadap informasi pendidikan bagi PNS, produk hukum yang tidak fleksibel mengakomodir pendidikan PNS di daerah jauh seperti Kabupaten Kapuas Hulu	UC	Apabila pengelolaan pendidikan Lanjutan ASN tidak ditunjang dengan dana yang memadai, maka kekurangan dan hambatan	Membuka peluang sebesar-besarnya bagi PNS untuk mengakses Beasiswa yang dari pihak ketiga, secara mandiri, dan yang bersumber dari APBN	√			√		4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)		Kabid PSDMA
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
34	Evaluasi Hasil dan Kinerja Aparatur	Jumlah penyusunan dan penilaian SKP sesuai ketentuan	1.	Terdapat berkas SKP yang belum sesuai dengan ketentuan dalam penyusunannya	Kurangnya pemahaman dari PNS dalam penyusunan SKP sesuai aturan yang berlaku dikarenakan perubahan	C	melalui aplikasi E-lapkin SAPK BKN	Pendampingan dalam penyusnan SKP	√				√	5	4	20	5 (Sangat Tinggi- Dimitigasi)	Sosialisasi/Bi mtek tentang penyusunan SKP	Kabid PSDMA

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					atas peraturan penyusunan SKP														
35	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah usulan penghargaan satya lencana karya satya Persentase pemberian tambahan penghasilan pegawai yang difasilitasi	1.	Penyelesaian Usulan relatif lama dan pengambilan Satyalancana Karya Satya bagi PNS di Daerah yang sudah diterbitkan oleh KEMENDAGRI melalui pengiriman kurir yang memerlukan biaya relatif besar.	Proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh admin membutuhkan waktu yang relatif lama dikarenakan usulan Tanda Jasa Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang harus diselesaikan mencakup seluruh PNS di Indonesia.	UC	Penerbitan dan penyelesaian Satyalancana Karya Satya tidak sesuai dengan periode pengusulan pada Bulan Agustus dan November, sehingga mengalami keterlambatan penyampaian kepada PNS yang menerima.	Pengusulan Satyalancana Karya Satya harus memenuhi syarat dan tepat waktu sesuai dengan periode yang sudah ditentukan serta entri data di Aplikasi SLKS harus sesuai dengan ketentuan, sehingga penyelesaian dapat tepat waktu dan pengambilan usulan SLKS yang sudah diterbitkan dapat diambil secara langsung di KEMENDAGRI.	√			√		4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Pengambilan Piagam Penghargaan Satyalancana Karya Satya agar dilakukan secara langsung datang ke Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan dapat berkonsultasi secara langsung mengenai usulan SLKS, sehingga tidak perlu lagi dikirim melalui jasa kurir.	Kabid D2KP
36	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Monitoring Disiplin PNS Persentase Pelaksanaan Mediasi Perceraian PNS Persentase Pelaksanaan	1.	Masih kurangnya tingkat kesadaran PNS terhadap Peraturan dan Ketentuan Disiplin PNS serta Kode Etik PNS.	Kurangnya kesadaran PNS untuk menaati aturan, baik aturan disiplin maupun kode etik PNS, selain itu terdapat oknum PNS	UC	Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik PNS masih sering terjadi, sehingga masih ada PNS yang dijatuhi berbagai jenis hukuman disiplin, baik tingkat ringan,	Melakukan upaya peningkatan disiplin secara Preventif, Korektif dan Progresif melalui Pembinaan Disiplin PNS, Pengawasan dan	√			√		5	4	20	5 (Sangat Tinggi – Dimitigasi)	Memberikan informasi dan melakukan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang ada tentang disiplin PNS dan Kode Etik PNS	Kabid D2KP

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Pembinaan Disiplin PNS			yang tidak mau menaati aturan yang belum dilakukan penindakan oleh instansi pembina sehingga menjadi preseden buruk bagi PNS lainnya.		sedang dan berat sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.	Inspeksi Kedisiplinan PNS dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik PNS.										di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.	
Pengembangan Kompetensi Teknis																			
37	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta pelatihan teknis dan fungsi	1.	rendahnya kompetensi teknis yang dimiliki oleh PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	tidak adanya anggaran yang dapat dialokasikan untuk	UC	Dampak yang akan ditimbulkan apabila pelatihan teknis tidak dilaksanakan maka kompetensi teknis PNS dalam melaksanakan tugas tidak akan optimal.	Untuk mengatasi permasalahan tersebut BKPSDM akan berupaya pro-aktif untuk menggali bentuk-bentuk pelatihan Non Klasikal yang ada di OPD masing-masing	√			√		4	4	16	4 (Tinggi – Dimitigasi)	Pengendalian terhadap implementasi Peraturan Bupati Nor 108 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengembangan Kompetensi PNS melalui Jalur Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Kabid PSDMA
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional																			
38	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	Jumlah Peserta pelatihan dasar CPNS Jumlah peserta	1.	Terjadi keterlambatan pengangkatan CPNS menjadi PNS dan berakibat kepada menurunnya motivasi kerja dan kinerja	Apabila anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan an Pelatihan	C	Anggaran yang diberikan tersedia walaupun tidak dapat memenuhi seluruh item kebutuhan yang	Menyampaikan kebutuhan yang belum terakomodir di APBD murni untuk kemudian	√			√		3	5	15	3 (Sedang)	Membuat Telaahan Staf kepada Ketua TAPD untuk penambahan anggaran yang	Kabid PSDMA

**REGISTER RESIKO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Resiko		Sebab Resiko	UC / C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada					Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik resiko/ Penanggung jawab	
			No	Pernyataan Resiko				Uraian	Desain Pengendalian		Efektifitas Pengendalian			P	D	Skor			Kategori/ Peringkat /Tingkat resiko
									A	T	TE	KE	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	pelatihan kepemimpinan administrator (Tingkat III		organisasi secara keseluruhan	Dasar CPNS tidak terakomodir sesuai kebutuhan.		diperlukan untuk keseluruhan rangkaian pelaksanaan pelatihan Dasar CPNS	dapat disesuaikan di APBD Perubahan 2022										menjadi kekurangan agar kegiatan dapat terlaksana dengan optimal.	
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan JPT (Tingkat II) Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (Tingkat IV)	2.	Terjadi stagnasi proses pengisian jabatan satu tingkat diatasnya serta pejabat yang telah menduduki jabatan akan tetapi belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dianggap tidak memiliki kompetensi yang mumpuni dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas fungsi yang telah diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)	Tidaknya dukungan anggaran yang memadai untuk pengiriman calon peserta PKN Tingkat II dan PKP di tempat yang memiliki izin penyelenggaraan kegiatan dimaksud. Serta tidaknya gedung yang representative untuk menyelenggarakan PKP di Kabupaten Kapuas Hulu	UC	Apabila penyelenggaraan pengiriman calon Peserta PKN Tingkat II dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) tidak dilaksanakan maka akan terjadi stagnasi proses promosi di jabatan satu tingkat diatasnya serta para pejabat yang menduduki jabatan tersebut dianggap tidak berkompeten dan tidak memenuhi syarat kompetensi dalam suatu jabatan	Pengusulan penambahan anggaran pengiriman calon peserta PKNN Tingkat II, PKP dan PKA	√		√			5	5	25	5 (Sangat Tinggi – Dimitigasi)	Membuat Telaahan Staf kepada Ketua TAPD terhadap pentingnya penganggaran Peltihan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (PKN) dan PKP di Kabupaten Kapuas Hulu	Kabid PSDMA

Berdasarkan uraian register resiko Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022, maka di dapat kesimpulan ada beberapa kegiatan yang memiliki kategori risiko sangat tinggi, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
2. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
3. Pengelolaan Mutasi ASN
4. Pengelolaan Promosi ASN
5. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
6. Pembinaan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara
7. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan:

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022, telah melakukan analisis Manajemen Resiko dari seluruh kegiatan yang ada sebanyak 40 sub kegiatan dengan rincian 1 sub kegiatan dengan tingkat risiko sedang, 32 sub kegiatan dengan tingkat risiko tinggi dan 7 sub kegiatan dengan tingkat risiko sangat tinggi.

b. Rekomendasi:

Analisis manajemen resiko harus dilakukan setiap tahun dari semua kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, hal ini dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap kegiatan, sehingga dari resiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan, sehingga semua kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, bentuk upaya pengendalian yang telah dirancang agar dapat dilaksanakan sebagai langkah minimalisasi dampak risiko yang terjadi dengan didukung sarana dan prasarana serta penganggaran agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan. Adapun rekomendasi dari sub kegiatan yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi, antara lain:

1. Adapun usaha yang dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut maka Pemda mengambil kebijakan dengan pengangkatan tenaga kontrak dan selalu berkoordinasi dengan Menpan agar dapat mempertimbangkan diberikan kuota formasi yang sesuai dengan jumlah kebutuhan ANJAB dan ABK. Bekerjasama dengan pihak BKN dalam hal penentuan jadwal agar pelaksanaan tes menyesuaikan dengan jadwal kesiapan panitia dan gedung yang akan kita

gunakan. Bekerjasama dengan Sekolah yang memiliki Gedung serta sarana dan prasarana yang sesuai ketentuan untuk pelaksanaan test mengingat Pemda belum memiliki fasilitas tersebut.

2. Pembuatan Database Offline dan mempublikasi data pegawai di Website.
3. Adapun pengendalian yang dilakukan ASN pada penempatan pertama diminta untuk membuat surat pernyataan tidak menuntut pindah dalam jangka waktu + 10 Tahun dengan maksud agar tidak terjadi kekosongan pada Instansinya. Memberikan fasilitas berupa rumah dinas dan kendaraan dinas kepada ASN sebagai bentuk untuk mempermudah dalam beraktivitas. Proses pindah lebih mendepankan less papper misalnya dengan berkas yg diserahkan diminta dalam bentuk softcopy dan dikirimkan via email, wa dengan maksud untuk mengurangi biaya pengiriman dan penggunaan kertas. Melakukan koordinasi secara intens dengan pihak BKD Provinsi Kalimantan Barat, Kanreg V BKN, Kantor BKN dan Kemendagri untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana perkembangan proses mutasi tersebut.
4. Pelaksanaan Assesment Kompetensi bagi Pejabat Struktural.
5. Pendampingan dalam penyusunan SKP.
6. Melakukan upaya peningkatan disiplin secara Preventif, Korektif dan Progresif melalui Pembinaan Disiplin PNS, Pengawasan dan Inspeksi Kedisiplinan PNS dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik PNS.
7. Pengusulan penambahan anggaran pengiriman calon peserta PKNN Tingkat II, PKP dan PKA.

Demikian Laporan Manajemen Resiko Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan RB di lingkungan Badan Kepegawaian Kabupaten Kapuas Hulu pada masa yang akan datang.

Putussibau, 31 Agustus 2022

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu,



H. SUDARSO, S.Pd., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19700505 199110 1 001